

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH
DAERAH, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PARIAMAN)**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

PATRIA DAYANA
NPM: 155310399

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**


Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp (0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : PATRIA DAYANA
NPM : 155310678
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI-SI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH, DAN
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
KOTA PARIAMAN.

Disahkan Oleh:

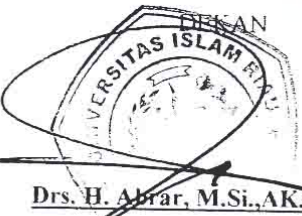
PEMBIMBING I


Yusrwati, SE., M.Si

PEMBIMBING II


Dina Hidayat, SE., M.Si., AK., CA

Mengetahui :


Drs. H. Abbar, M.Si., AK., CA

KETUA PRODI AKUNTANSI SI


Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK., CA

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH
DAERAH, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN)**

Oleh :

PATRIA DAYANA

155310399

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kota Pariaman).

Dalam penelitian ini penelitian dilakukan pada SKPD yang berada di lingkungan Kota Pariaman, yang berjumlah 23 instansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan kepala sub-bagian keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan memberikan kuesioner kepada 3 orang responden setiap instansi sehingga jumlah responden sebanyak 69 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan 69 kuesioner pada 23 instansi/dinas di Kota Pariaman. Penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 22.

Penelitian ini menunjukkan jika penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, ketaatan pada peraturan perundangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Pariaman, sedangkan secara parsial pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pariaman.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Segalanya senantiasa penulis ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "*Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi Pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Pariaman)*". Penulisan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelas sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sangat-sangat ingin penulis ucapkan, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Riau
3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Ibu Yusrawati, SE., M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, ilmu pengetahuan, motivasi sehingga penulis

mengerti arti perjuangan dan kesabaran serta keikhlasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, semoga ibu sehat selalu.

7. Ibu Dina Hidayat., SE., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, Ilmu pengetahuan, dan penulis sangat bersyukur karena skripsi ini insyaallah sudah tidak ada lagi kesalahan menulis dalam kata ataupun kalimat karena ketelitian ibu, dan semoga ibu sehat selalu.
8. Bapak/ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan penulis ilmu, dan pengalaman sekaligus menjadi motivasi untuk penulis agar bisa berilmu serta sukses seperti Bapak/ibu Dosen sekalian.
9. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/ibu Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang sudah banyak membantu penulis selama kuliah.
10. Bapak/ibu Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuanga, dan Kepala Sub-bagian Keuangan, dan seluruh pegawai SKPD Kota Pariaman yang sudah memberikan izin, membantu penulis juga untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teristimewa sekali kepada Orang Tuaku Tersayang, Ayahanda USEPRI dan Ibunda YULIANIS yang sudah memberikan cinta dan kasih sayangnya, dan yang sudah banyak mengeluarkan uang selama kuliah ini, yang selalu bermimpi dan mempunyai impian melihat anaknya menjadi Sarjana dan

Wisuda, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan memberikan penulis kesempatan untuk menjadi kebanggaan untukmu orang tuaku

12. Buat Tante Elvi Melly, SE, yang telah menjadi tempat curhat terbaik selama mengerjakan skripsi ini, semoga Allah memberikan kesempatan
13. Buat Adikku Amukha Raja Prasya, semoga bisa menggapai cita-citanya, Abangku Harry Zona Mandela yang sudah membantu mendoakan penulis.
14. Buat Abdul Aziz, SH yang sudah menjadi tempat keluh dan kesah penulis, tempat pelampiasan penulis saat badmood skripsi, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita kita.
15. Buat Tati Andriani, SE sahabat kuliah dari awal kuliah tapi udah ambil start duluan jadi sarjana, semoga kita bisa bertemu lagi dengan situasi yang sudah berbeda.
16. Buat Melia Tri Lestari sahabat sejak SMA terimakasih sudah menjadi tempat tertawa bersama dalam menyusun skripsi.
17. Buat teman-teman yang sudah mau direpotkan penulis, maaf tidak bisa disebutkan secara rinci, penulis sadar bahwa penulis adalah orang yang suka menyusahkan meskipun penulis tidak bisa membalasnya semoga Allah selalu memberikan kemudahan dihidup kita semua.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian	8
D. Sistematika penulisan	9
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
A. Telaah Pustaka	11
1. Akuntabilitas	11
2. Kinerja Instansi Pemerintah	12
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ..	14
4. Penerapan Akuntabilitas Keuangan	16
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	17
6. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	19
7. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	21
8. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

9. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23
10. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	24
11. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	26
12. Penelitian Terdahulu	26
13. Model Penelitian	29
B. Hipotesis	30
BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi dan Objek Penelitian	32
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	37
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Uji Kualitas Data	41
G. Uji Asumsi Klasik	41
H. Teknik Analisis Data	43
I. Pengujian Hipotesis	44
J. Koefisien Determinasi	44
BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN	46
A. Sejarah singkat terbentuknya Kota Pariaman	46
B. Visi dan misi pemerintahan Kota Pariaman	46
1. Visi Pemerintah Kota Pariaman	46
2. Misi Pemerintah Kota Pariaman	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner

Lampiran 2 Tabulasi

Lampiran 3 Uji Mahditas

Lampiran 4 Uji Reliabilitas

Lampiran 5 Regresi Linear



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pedoman penyusunan penetapan kinerja daerah, instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi kementerian koordinator/ kementerian Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemko, pemkab serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan APBD. Agar penggunaan APBD dan APBN menjadi efisien dan efektif maka dalam pengelolaannya diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. (Peraturan Menteri Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja).

Berdasarkan PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Informasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menentukan atau melakukan suatu perbaikan

manajemen dalam membuat segala urusan di pemerintahan menjadi lebih baik lagi dimana akan berdampak luas nantinya pada bidang ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa memicu perubahan iklim investasi dan di bidang politik dapat menciptakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri.

Informasi AKIP juga digunakan sebagai pertanggungjawaban dalam menyusun laporan keuangan oleh kepala pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintah kepada masyarakat melalui DPR/D disetiap akhir tahun anggaran, dan diakhir jabatan kepala pemerintah yang dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari setiap instansi Pemda termasuk didalamnya instansi Pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat.

Akuntabilitas keuangan merupakan hal didahulukan untuk menentukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika akuntabilitas keuangan itu baik biasanya memiliki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula dalam sebuah instansi pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2001:29) menjelaskan pengertian akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan

peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Penerapan akuntabilitas keuangan mewajibkan instansi memberikan laporan kinerja keuangan yang telah dilakukan pada kurun waktu tersebut, dalam tujuan mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel, karena itu terdapat indikasi dalam pengembangan penerapan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata. Penerapan system akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata dapat difasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi (TI).

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi (TI) telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bagian yang berpengaruh dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat membantu dalam penyelenggaraan negara menuju *value for money* (ekonomis, efektif dan efisien) menuju upaya yang optimal serta juga dapat menghemat waktu (*time saving*) dan menghemat biaya (*cost saving*). Namun, pengimplementasian pemanfaatan teknologi informasi yang tidak atau belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dapat menciptakan pengimplementasian pemanfaatan teknologi informasi menjadi percuma.

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 10 menyatakan “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diinginkan”. Rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja salah satu

penyebab rendahnya juga kompetensi aparatur pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja bisa dilakukan dengan adanya pelatihan-pelatihan serta pemahaman untuk aparatur pemerintah daerah agar menjadikan dasar sebagai evaluasi dalam membuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada dasarnya keseluruhan kompetensi individu dibentuk oleh keahlian yang bersifat pengetahuan dan fisik. Untuk itu dengan memiliki kompetensi yang tinggi pada aparatur pemerintah pasti akan meningkatkan kinerja pada instansi tersebut.

Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan hal yang terpenting dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena sangat berpengaruh secara langsung. Dengan adanya ketaatan pada peraturan perundangan maka akan ada transparansi hukum yang jelas dalam menjadikan akuntabilitas yang efektif. AKIP yang dihasilkan diharapkan dapat tepat waktu dan sesuai dalam kebutuhan pemenuhan informasi publik dan aparatur pemerintah pusat. Namun seringkali pemerintah kurang melaksanakan peraturan yang telah dibuat.

Soleman (2007) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Maluku Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Riantirno & Nur Azlina (2011) tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Kabupaten Rokan Hulu, hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan

akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Ardianto (2014) tentang Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi), menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pemanfaatan teknologi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Egrinaen Maulizka Nugraheni Putri (2015) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan pada Empiris pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah di kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu hasil Peneliiian yang dilakukan oleh Azwir Nasir dan Rianti Oktari (2012) tentang Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap

kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Kampar, menunjukkan terdapat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Pariaman pada saat ini sedang mendapat perhatian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) yang mengharapkan Wali Kota Pariaman mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di daerah yang dipimpinnya. Ada tiga sasaran reformasi briokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. (<https://www.menpan.go.id>).

Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pariaman. Hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan Kementerian PANRB, nilai SAKIP Kota Pariaman masih berada pada posisi CC (Cukup/Memadai) . Usai menerima hasil kepala SKPD Kota Pariaman yakni, taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mampu dalam pengelolaannya, memahami akan tugas terhadap peningkatan kinerja guna dalam pencapaian penyelenggara pemerintah yang lebih baik (<https://www.menpan.go.id>).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan oleh Kota Pariaman, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Kota Pariaman (<https://www.pariamankota.go.id>).

Berdasarkan inkonsistensi penelitian sebelumnya maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali. Penulis ingin menguji pengaruh dalam penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pariaman. Dimana ada banyak penanganan berbagai masalah yang dituding karena kinerja yang masih kurang atau yang masih belum memadai pada saat mereka harus membuat akuntabilitas yang baik dalam pemerintah. Kondisi ini lah yang menunjukkan kurang adanya kesadaran bagi aparatur pemerintah bahwa sistem informasi adalah aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap instansi pemerintahan.

Penelitian ini merupakan tiruan dari penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015). Perbedaan penelitian ini dengan Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu mengambil objek SKPD kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilakukan pada SKPD Kota Pariaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian di Kota Pariaman yang berjudul : **Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pariaman.
2. Apakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pariaman.
3. Apakah pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pariaman.
4. Apakah pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pariaman
5. Apakah pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pariaman.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

mengkaji secara empiris pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pariaman.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah Kota Pariaman
- c. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

D. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- BAB I** : Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang menjadi pembuka, dengan menggunakan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan penelitian ini.
- BAB II** : Bab kedua membahas uraian teoritis atau telaah pustaka, yang meliputi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, ketaatan pada peraturan perundangan, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.
- BAB III** : Bab ketiga ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber

data peneltian, teknik pengumpulan data penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, analisis data penelitian, serta pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV : Bab keempat ini menguraikan gambaran umum pemerintah Kota Pariaman meliputi visi dan misi pemerintah Kota Pariaman, gambaran umum SKPD Kota pariaman dan aktivitas SKPD Kota Pariaman.

BAB V : Bab kelima ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang didapat dari analisis data dan temuan empiris yang diperoleh, serta pembahasannya atau interprestasi pengaruh setiap variabel dalam penelitian ini.

BAB VI : Bab keenam ini membahas bab penutup yang berisikan kesimpulan mengenai pembahasan yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2001 : 22) menjelaskan :

Akuntabilitas berasal dari istilah Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dimintai pertanggung jawaban.

Untuk mengungkap suatu konsep pemahaman yang luas, LAN & BPKP (2001 : 22-23) mengutip pernyataan dari J. B Gharney yang menyatakan bahwa :

Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, yang mana, dan bagaimana (LAN 2001). Pertanyaan yang memerlukan jawaban, apa yang harus dipertanggung jawabkan, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya. Dengan demikian akuntabilitas merupakan instrumen untuk kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Pengertian asas akuntabilitas menurut UU Pemda 2014 merupakan :

“Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkan kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.”

LAN dan BPKP (2001 : 29) pembagian akuntabilitas sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas manfaat
3. Akuntabilitas procedural

Konsepsi akuntabilitas (Koppell, 2005) mengandung lima dimensi utama, yaitu mencakup :

1. Transparansi (sudahkah organisasi terbuka dengan fakta-fakta kinerjanya). Transparansi adalah sesuatu yang paling utama dalam prasyarat menyusun akuntabilitas, karena akuntabilitas tidak akan

- berjalan efektif dan efisien tanpa transparansi yang jelas, transparansi yang jelas akan memenuhi kebutuhan publik terhadap akuntabilitas.
2. Liabiliti (Sudahkah organisasi memperhatikan konsekuensi dari kinerjanya). Pemerintah harusnya mengkaji dengan cerdas dan tajam dalam segala yang menjadi dampak kebijakan dan konsekuensi
 3. Pengontrolan (Sudahkah organisasi melaksanakan prinsip-prinsip yang dianjurkan). Apakah prinsip perencanaan *bottom-up* dipatuhi secara konsisten.
 4. Tanggungjawab (Sudahkah organisasi mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan). Dalam sebuah organisasi harus bertanggung terhadap aturan yang telah ditetapkan.
 5. *Responsive* (sudahkah organisasi memenuhi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat). Apakah organisasi tersebut telah memenuhi jawaban dari kebutuhan informasi masyarakat.

Hal-hal yang dapat menjadi keharusan mewujudkan keberhasilan akuntabilitas dibutuhkannya pemimpin yang memiliki sifat cepat tanggap dan bertanggung jawab akan keterbukaannya kepada bawahannya maupun masyarakat. Selain itu, standar penilaian kinerja harus dilakukan dengan jelas dan nyata sehingga tau secara jelas dan pasti apa yang diakuntabilitaskan.

2. Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi (*performance*). Moehariono (dalam Rosyida 2010:11) dalam bukunya menyimpulkan pengertian kinerja atau definisi kinerja atau *performance* sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Namun sebenarnya, Amstrong dan Baron (1998) menjelaskan bahwa kinerja merupakan:

Hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Menurut Usman dan Lukman (2014: 77) terdapat beberapa jenis indikator kinerja pemerintah daerah, yaitu :

1. Indikator Masukan (*input*), adalah sesuatu yang diperlukan agar aktivitas dapat berjalan efektif.
2. Indikator Proses (*process*). Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan beberapa kegiatan seperti ketetapan ataupun tingkat akurasi pelaksanaan agar berjalan efisien dan ekonomis.
3. Indikator Keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
4. Indikator Hasil (*outcome*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator Manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (*impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengertian akuntabilitas Kinerja menurut UU Nomor 29 Tahun 2014 Pasal

1 Nomor 14 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

“Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamankan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”

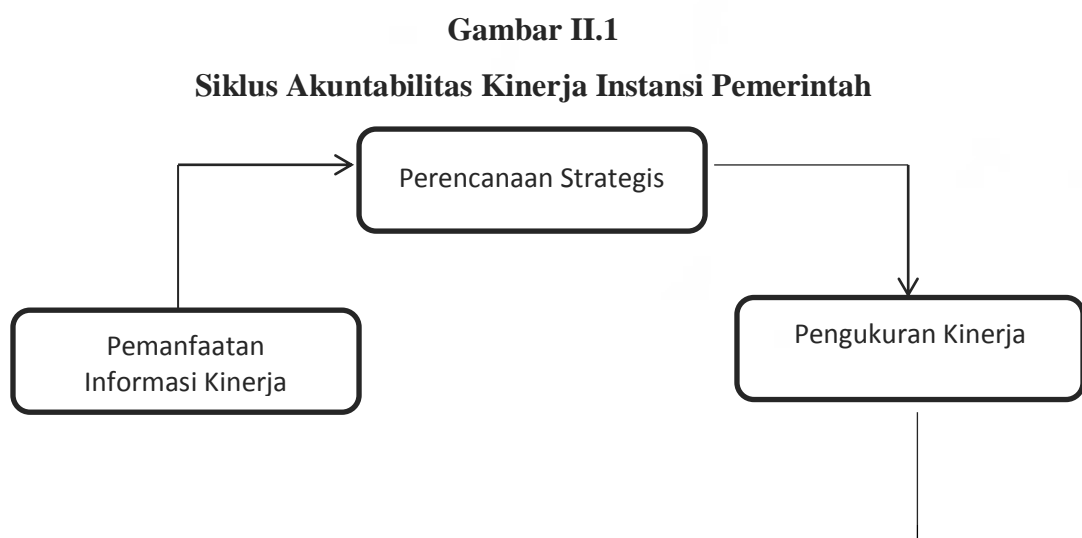
Menurut LAN (2003: 14) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan:

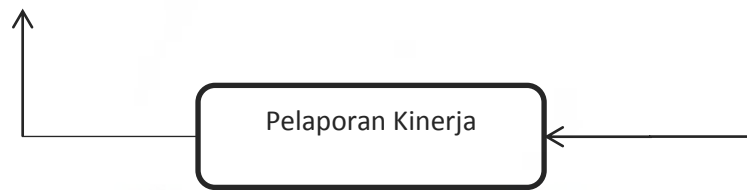
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic melalui perwujudan kewajiban pada instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategis.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :





(Sumber : Pusdiklatwas BPKP , 2011)

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada gambar II.1 dimana yang pertama adalah dimulainya dengan menyusun perencanaan strategis yang meliputi gambaran dan tujuan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan tersebut. Strategi ini lalu dijelaskan lagi sebagai perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kerja ini menyampaikan seluruh capaian kinerja yang ingin dilakukan (*output/outcome*) dari semua poin-poin strategi untuk mewujudkannya. Rencana kerja ini menjadi batasan untuk menilai kinerja instansi pemerintah penyelenggara pemerintahan selanjutnya. Setelah rencana kerja diputuskan, pada tingkat selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Data kinerja tersebut capaian kinerja yang diambil pada satu indikator kinerja.

Dengan adanya data kinerja yang diperlukan dalam pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah butuh menjabarkan sistem dalam pengumpulan data kinerja, yaitu instrument dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir tahun, pencapaian kinerja dibuat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau kepada yang berwenang. Tahapan terakhir yaitu informasi yang termuat dalam LAKIP dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja instansi secara berkaitan satu dengan yang lainnya.

4. Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan hal penting dalam mewujudkan integritas keuangan, dimana laporan keuangan yang disajikan termasuk dalam laporan pertanggungjawaban yang mencakup penyimpanan, pengeluaran, dan penerimaan oleh instansi pemerintah (Hasibuan (2010)).

Akuntabilitas keuangan adalah indikator pertama untuk memberikan nilai untuk kinerja suatu instansi pemerintah. Jika akuntabilitas keuangan instansi pemerintah sudah baik, maka boleh dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut juga sudah baik. Karena publik lebih terfokus menilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan kinerja keuangannya.

Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri dari:

a. Integritas Keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan, dan keutuhan. Dengan kata lain kejujuran merupakan hal yang diperlukan dalam menyajikan integritas keuangan.

b. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus memperlihatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah. Apabila ada ketidaksesuaian antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Secara umum teknologi Informasi merupakan suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak komputer).

Dengan penggunaan teknologi informasi yang merupakan penggabungan antara teknologi komputer dengan sistem informasi dapat membantu memudahkan para akuntan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami sehingga akan membantu pengambilann keputusan. (Mahardika Amelia Putri: 2015).

Menurut Lucas dalam Rusman (2011) Teknologi Informasi merupakan :

Segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, mikro komputer, komputer *mainframe*.

Pemanfaatan teknologi juga berhubungan dengan perilaku/sikap yang menggunakan teknologi tersebut untuk membantu meningkatkan dan menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi

memberikan peran utama dalam sebuah organisasi, yaitu dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, komunikasi, dan kompetitif

Terdapat enam fungsi teknologi informasi (Sutarman : 2009), yaitu:

- a. Menangkap (*capture*)
- b. Mengelolah (*processings*), mengolah/memproses data masukan yang dijadikan untuk sebuah informasi.
- c. Menghasilkan (*generating*), menghasilkan data dengan bentuk seperti table dan graffik
- d. Menyimpan (*store*), merekam atau menyimpan data dan informasi kedalam bentuk disket ataupun *flashdisk*
- e. Mencari kembali (*Retrival*), mengulang mencari lagi informasi atau menyalin kembali informasi yang sudah tersimpan
- f. Transmisi (*transmission*), beralih dalam artian bertransmisi dari user A ke user lainnya. Contohnya: mengirimkan data penjualan dari grosik ke toko lainnya.

6. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Pengertian kompetensi menurut “UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10” tentang Ketenagakerjaan adalah:

“Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 22 Tahun 2011, mendefinisikan Kompetensi sebagai :

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.”

Dari definisi diatas kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan tersebut harus didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran.

Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan “bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap pegawai negeri sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kompetensi aparatur pemerintah menjadikan sesuatu untuk dicapainya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif. Sesuai dengan dasar pembuatan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif.

Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen untuk pembentukan kompetensi, yaitu :

a. Pengetahuan (*knowledge*).

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang ditekuni.

b. Keterampilan (*skill*).

Keterampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.

c. Sikap (*attitude*).

Sikap merupakan pola tingkah seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan atau pemerintah.

7. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan.

Ketaatan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (versi online) berarti kepatuhan. Sedangkan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam konteks Negara Indonesia, yaitu aturan tertulis yang dibuat pihak yang berwenang dan dipatuhi secara general (Wikipedia.com).

Secara logis kerangka konseptual merupakan hubungan landasan teori dan kajian empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplansi asosiatif yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono,

2016:12). Menunjuk bentuk konseptual pada *financial accounting standards boards* (FASB), yang merupakan rencana pekerjaan yang paling keliatan dan menciptakan peraturan akuntansi. peraturan ini diharapkan mendapatkan dan menunjukkan perilaku kolektif dan penerimaan umum dalam lingkungan pelaporan keuangan guna untuk melindungi kepentingan publik.

Choi dan Bambang Pamungkas dalam Soleman (2007) menyebutkan bahwa perkembangan akuntansi dan pengaruh hukum mempunyai kaitan. Suatu negara tergantung pada sistem yang dimuatnya, apakah negara yang bersangkutan mengenai *Civil Law* atau *Common Law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terkumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan publik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membedakan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena standar akuntansi bersisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian informasi keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Salah satu reformasi dalam manajemen keuangan pemerintah adalah dalam bidang penganggaran yaitu ditetapkannya anggaran kinerja sebagai basis penganggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanakan oleh Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan. Negara Pasal 14 ayat 2 “bahwa rencana kerja dan anggaran pemerintah disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sebelumnya telah diperkenalkan oleh peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 Tahun 2000 “tentang pengelolaan dan disusun berdasarkan pendekatan kinerja”. Fungsi pemerintah yang menjadi subjek pengukuran kinerja harus dikaitkan dengan anggaran. Karena itu klasifikasi anggaran harus berdasarkan fungsi-fungsi pemerintah. PP No 105 Tahun 2000 Pasal 15 menyatakan “belanja daerah dirinci menurut organisasi., fungsi dan jenis belanja”, sedang “UU No 17 Tahun 2003 Pasal 15 dan 16 menyatakan klasifikasi anggaran menggunakan klasifikasi organisasi dan jenis belanja”.

Standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan harus selaras dengan sistem anggaran pemerintah.

8. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas keuangan merupakan indikator utama untuk menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Jika akuntabilitas keuangan instansi pemerintah sudah baik, maka boleh dikatakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut juga sudah baik. Karena publik lebih terfokus menilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan kinerja keuangan.

Penelitian terdahulu juga menunjukan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Liliana (2011) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

9. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Segala dengan kemampuan zaman dan teknologi yang semakin canggih, manusia diharapkan dapat mengikuti perkembangan kemajuan tersebut serta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sesuatu yang diharapkan oleh para pengguna sistem informasi untuk melakukan tugasnya dalam menggunakan teknologi agar memudahkan pekerjaannya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi (Maridiasmo : 2009)

Azwir dan Ranti (2013) menyimpulkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketidaksignifikan ini mungkin disebabkan sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem. Ini lah yang menyebabkan komputerisasi memakan waktu yang lama dan

biaya yang mahal, dan berakibat bisa melumpuhkan sistem dan menghilangkan jejak audit.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2014). Yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Azwir Nasir dan Rianti Oktari, yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

10. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengertian kompetensi menurut “UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 tentang ketenagakerjaan adalah” :

“Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang “Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai, standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas jabatan”. Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 29 tahun 2014 yang menyatakan “bahwa dalam mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten dan melayani setiap

Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat”.

Penelitian yang dilakukan Hutari (2011) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

11. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara. Terdapat dua poin, dimana dua poin tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan AKIP hanya berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga merupakan bagian dari peraturan perundangan yang harus ditaati

Vina (2008) menyebutkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas harus ada dukungan oleh aturan konstitusi yang ada dalam pelaksanaan penerapan *reward system* dan *punishment system* secara stabil dan memperbarui aturan dalam laporan akuntabilitas.

Menurut penelitian Liliana (2011) menyimpulkan bahwa ketaatan peraturan perundangan sangatlah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu juga dengan Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

12. Penelitian Terdahulu

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun peneliti, variabel peneliti yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel II.1

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (tahun)	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2012)	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah (S tudi pada SKPD Kabupaten Kampar)	Variabel penelitian indenpenden: pemanfaatan teknologi,pengenda lian intern. Variabel dependen: kinerja instansi pemeritah	Terdapat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah
2	Egrinaen Mauliziska Nuraheni Putri (2015)	Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan	Variabel independen : kompetensi aparatur pemerintah daerah,	Terdapat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah

		akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan	penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan. Variabel Dependen : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap AKIP
3	Komang Sri Endrayani, I Made Pradana Adiputra, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah kota Singaraja	Variabel independen: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Variabel Dependen : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4	Marion Yulian Yue (2010)	Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan	Variabel Independen : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah,	Kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh

		akuntabilitas keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Tembilahan	Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan . Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5	Rofika dan Ardianto (2014)	Pengaruh Penerapan Akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi	Variabel Independen : penerepan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kommpetensi aparatur pemerintah daerah, ketaatan terhadap peraturan perundangan. Varibel Dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penerapan akuntabilitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundangngan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur

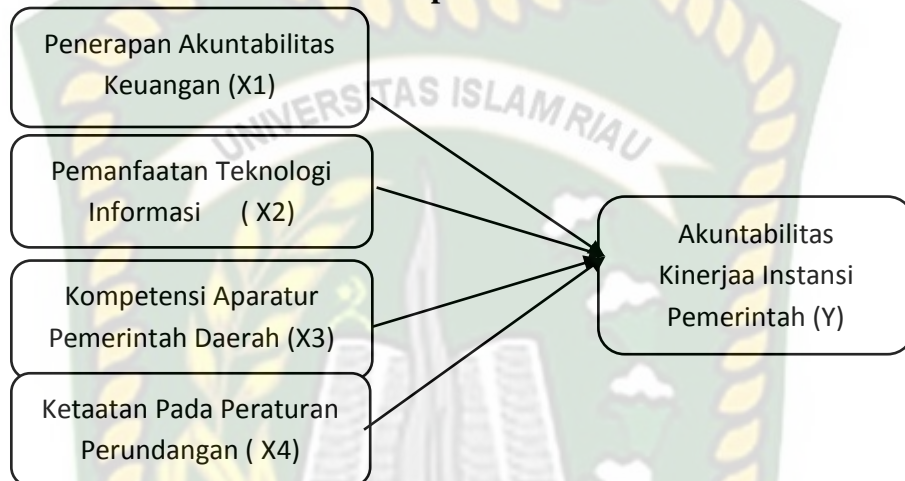
				pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6	Rusman Soleman (2007)	Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Maluku Utara	Variabel Independen : Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan . Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Kompetensi, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan, penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

13. Model penelitian

Berdasarkan landasan teori terdahulu, maka penulis membuat suatu model penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu penerapan akuntabilitas keuangan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2),

kompetensi aparatur pemerintah (X3), ketaatan pada peraturan perundangan (X4), terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebagai berikut:

Gambar II.2
Model penelitian



B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- H3 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- H4 : Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H5 : Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan dipemerintah daerah Kota Pariaman dengan cara menyebarkan kuesioner yang sesuai terhadap apa yang diteliti yaitu “ Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi,

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman”.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Sesuai dengan hipotesis yang diteliti “ Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman”. Maka terdapat 2 (dua) variabel dalam penelitian ini yang variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen (Y)

Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, LAN (2003: 3). AKIP dalam penelitian ini berfokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman.

Instrumen variabel ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Santri Tati adalah:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi dan pencapaian sasaran tahunan.

- 2) Pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan input (penggunaan sumber daya keuangan, manusia, material, waktu dan teknologi).
- 3) Pertanggungjawaban terhadap output produk atau jasa, outcome dari suatu aktivitas yang mencerminkan berfungsinya output, dan benefit yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
- 4) Pertanggungjawaban terhadap impact pada social ekonommi, lingkungan, atau kepentingan ekonommi akibat dari dilaksanakannya suatu kegiatan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* yaitu dengan skor 5 (lima) sampai dengan 1 (satu).

2. Variabel Independen (X)

a. Akuntabilitas Keuangan (X₁)

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, perlengkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dimana sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN,2002: 28) dalam Hasibuan (2010).

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan (Ithyanul Ulum 2010: 41) :

- a) Memenuhi persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundangan.
- b) Integritas dalam penyusunan dan pengurusan laporan keuangan.
- c) Memiliki maksud, tujuan, objek, pejabat yang bertanggungjawab,serta fungsi yang jelas dalam setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan.

d) Laporan keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan.

Variabel ini di ukur berdasarkan skala likert dengan skala penilaian (skor) 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan yang dikembangkan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015). Masing masing pilihan jawaban diberi nilai 1 (satu) untuk jawaban ekstrim negatif dengan nilai 5 (lima) untuk jawaban ekstrim positif.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah prilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Penggunaan teknologi informasi yang merupakan penggabungan antara teknologi komputer dengan sistem informasi dapat membantu memudahkan para akuntan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat di percaya, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami sehingga akan membantu pengambilan keputusan (Mahardika Amelia Putri: 2015).

Instumen variabel ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) dengan indikatornya sebagai berikut:

- 1) Teknologi informasi yang dimiliki dapat mendukung sasaran dan tujuan strategi.
- 2) Menelaah peluang yang diberikan teknologi informasi.
- 3) Memiliki gambaran mengenai kualitas dari sistem teknologi informasi.
- 4) Penjadwalan pemeliharaan peralatan yang teratur.
- 5) *Monitoring* berkala terhadap kinerja teknologi informasi.

- 6) Bagian teknologi informasi memiliki pertanggungjawaban yang jelas serta kriteria penilaian yang jelas dan memiliki anggapan bahwa penting untuk memperbaharui sistem teknologi informasi demi kepentingan tugas.

Variabel diukur berdasarkan *skala Likert* dengan skala penilaian (skor) 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang terdiri dari 14 (empatbelas) item pertanyaan yang dikembangkan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015). Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1(satu) untuk jawaban ekstrim negatif dengan nilai 5 (lima) untuk jawaban yang ekstrim positif.

c. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X₃)

“UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan standar yang ditetapkan”.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi aparatur pemerintah daerah diambil dari penelitian Erginaen Mauliziska Nugraheni Putri :

- 1) Memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan serta keahlian yang mendukung aktivitas kerja.
- 2) Mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang mendukung aktivitas kerja.
- 3) Memiliki kemampuan berfikir analisis, konseptual, berkomitmen, fleksibel dan bertanggungjawab dengan organisasi.

Variabel ini diukur berdasarkan Skala *Likert* dengan skala penilaian (skor) 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan yang dikembangkan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015). Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 (satu) untuk jawaban ekstrim negatif dengan nilai 5 (lima) untuk jawaban yang ekstrim positif.

d. Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X₄)

Peraturan Perundangan-undangan dalam konteks Negara Indonesia adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dipatuhi secara general oleh masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketaatan pada peraturan perundangan (Chefrida, 2014) :

- a) Peraturan perundangan sebagai pedoman dan kepastian hukum pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b) Peraturan perundangan memberikan ketegasan kepada pejabat dalam menunjukkan tujuan instansi dan mentaati penyelenggaraan administrasi aspek keuangan.
- c) Peraturan perundangan memiliki aturan yang menyatakan perlunya melaksanakan akuntabilitas publik dengan benar dan sesuai aturan, serta mengharuskan penyelenggaraan Negara mentaati serta melaksanakan akuntabilitas publik.
- d) Peraturan perundangan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang, serta memberikan arahan dalam pelaksanaan hukum akuntabilitas publik.

Variabel ini di ukur berdasarkan Skala *Likert* dengan skala penilaian (skor) 1 (satu) sampai 5 (lima) yang terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan yang dikembangkan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015). Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 (satu) untuk jawaban ekstrim negatif dengan nilai 5 (lima) untuk jawaban yang ekstrim positif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kota Pariaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pariaman, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman berjumlah 28 SKPD yang terdiri dari Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan. Dapat dilihat pada table III.1

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 23 SKPD, penulis tidak memasukan kecamatan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman.

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala sub-bagian Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdapat di masing-masing SKPD yang ada di kota Pariaman, sehingga besar sampel sebanyak 69 orang = 3 (23 SKPD). Dapat dilihat pada table III.2

Tabel III.1
Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)
4	Dinas Perhubungan
5	Inspektorat
6	Dinas Kesehatan
7	Badan Keuangan Daerah (BKD)
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
10	Dinas SATPOL PP Dan DAMKAR
11	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dan Tenaga Kerja
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB (DP3AKB)
16	Dinas Lingkungan Hidup
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
18	Dinas Sosial
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

21	Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertahanan
22	Dinas Perindustrian,Perdagangan dan UMKM
23	Dinas Pertanian Dan Pangan
24	KESBANGPOL
25	Kecamatan Pariaman Utara
26	Kecamatan Pariaman Selatan
27	Kecamatan Pariaman Tengah
28	Kecamatan Pariaman Timur

Sumber : pariamankota.go.id

Tabel III.2
Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman

no	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah	3
2	Inspektorat	3
3	Badan Keuangan Daerah	3
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3
5	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa	3
6	Dinas Perhubungan	3
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3

	Daerah	
8	Dinas Kesehatan	3
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
11	Dinas Satpol PP dan DAMKAR	3
12	Dinas penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	3
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)	3
16	Dinas Lingkungan Hidup	3
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3
18	Dinas Sosial	3
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
21	Dinas Pertanian dan Pangan	3
22	KESPANGBOL	3
23	Kecamatan Pariaman Tengah	3
TOTAL		69

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yaitu dengan menggunakan kuesioner. Data tersebut berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini SKPD yang terdapat di Kota Pariaman, Sumber data penelitian ini

adalah skor total yang di peroleh dari pengisian kuesioner yang telah dikirim kepada SKPD yang terdapat di Kota Pariaman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara mengantarkan kuesioner secara langsung kepada setiap responden, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan, staf keuangan pada 23 Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah Kota Pariaman. Masing-masing kuesioner disertai dengan surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan kepada responden dengan waktu yang disepakati peneliti, akan menjemput kuesioner kembali yang telah selesai dijawab pada setiap SKPD.

Jenis skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan.

F. Uji Kualitas Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Uji Validitas

Nilai validitas dapat dilihat pada kolom *corrected item-tool correlation* dengan kriteria : jika $r\text{-hitung} >$ dari $r\text{-tabel}$ maka skor butir pertanyaan-pertanyaan kuesioner dinyatakan valid, tetapi sebaliknya jika $r\text{-hitung} <$ dari $r\text{-tabel}$ maka skor butir pertanyaan-pertanyaan kuesioner dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengertian reliabilitas adalah suatu instrument yang cukup dipercaya sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya dan realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

G. Uji Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikoleniaritas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data memiliki tujuan untuk melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki mempunyai distribusi normal atau mendekati normal dengan melihat *Normal Probability*. Jika diasumsikan bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual distribusi normal, jika ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Ada dua cara yang dapat digunakan dalam menguji normalitas dan model regresi yaitu, dengan analisis grafik (*normal probability plot*) dan analisis statistik (analisis *Zscore skewness dan kurtosis*) *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Menurut Ghazali Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen. Salah satu cara untuk mendekati ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) <10 dan *tolerance* >0.10

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005 : 105). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidak terjadi heteroskedastisitas adalah dengan uji korelasi rank spearman. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai sig (2-tailed) $>0,05$, maka hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya atau bebas heteroskedastisitas (Santoso,2001: 161).

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer Statistical Package For Science (SPSS).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

α = Konstanta

b = Koefisien regresi masing-masing X

X₁ = Penerapan Akuntabilitas Keuangan

X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₃ = Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

X₄ = Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

E = Variabel Pengganggu (Error Term)

I. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Simultan (uji-F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Imam Ghazali, 2006)

2. Pengujian Secara Parsial (uji-t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji secara individu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b) Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

J. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Pada R^2 memiliki aturan main jika R^2 mendekati 1 (satu) berarti variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen, sebaliknya pun seperti itu jika nilai R^2 semakin kecil maka variabel dependen sedikit akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen.



BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN

A. Sejarah Singkat Terbentuk Kota Pariaman

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500-an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Pada tahun 1686 orang Pariaman (Pryaman) mulai berhubungan dengan Inggris, sebagai daerah yang di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad silam. Namun seiring dengan perjalanan masa, dimulainya pembangunan jalan kereta api dari Padang ke Pariaman pada Tahun 1908.

B. Visi dan Misi Pemerintah Kota Pariaman

1. Visi Pemerintah Kota Pariaman

“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan Berbudaya”

2. Misi Pemerintah Kota Pariaman

- a. Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya.
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
- c. Mewujudkan pemerintah yang andal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis, dan bewawasan lingkungan.
- e. Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat.

C. Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kota Pariaman

Organisasi dan tata kerja SKPD Daerah Kota Pariaman, susunan yang ada pada organisasi SKPD Daerah Kota Pariaaman adalah sebagai berikut:

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pariaman.

1. Sekretariat Daerah.
 - a. Tugas Sekretariat Daerah adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tugas administrasi kesekretariat, keuangan dan hubungan masyarakat serta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - b. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) Merencanakan, mengolah, menelaah, dan mmengkoordinasikan perumusan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 2) Mengelola administrasi ketatausahaan, keuangan, pembinaan, kepegawaian, rumah tangga dan hubungan masyarakat.
 - 3) Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan/rapat-rapat, upacara, pelantikan dan acara-acara resmi yang diselenggarakan DPRD.
2. Dinas Kesehatan.
- a. Tugas Dinas Kesehatan adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan.
 - b. Fungsi Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan perencanaan bidang kesehatan.
 - 2) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.
 - 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan.
 - 4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan pengembangan sumber daya kesehatan.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- a. Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

- 2) Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pembinaan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi.
 - a. Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan darat, sungai dan udara.
 - b. Dishubkom info mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya.
5. Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga
 - a. Tugas Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga adalah membantu WaliKota dalam melaksanakan tugas dalam bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga.
 - b. Pariwisata, pemuda dan olahraga mempunyai fungsi:
 - 1) Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, pemuda, dan Olahraga
 - 2) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menarasikan kebijakan dan kegiatan pengembangan Pariwisata, pemuda dan olahraga.
 - 3) Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

6. Dinas Pekerjaan Umum
 - a. Tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dalam lingkup ke PU-an.
 - 2) Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dalam lingkup ke PU-an
 - 3) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.
7. Dinas Pendidikan
 - a. Tugas Dinas Pendidikan adalah membantu WaliKota dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan.
 - b. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi menyusun kebijakan pendidikan mulai fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan. Sesuai struktur organisasi dan tata kerja, Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
8. Inspektorat.
 - a. Tugas inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksana urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atau penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
 - b. Inspektorat mempunyai fungsi:
 - 1) Perencanaan program pengawasan.

- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaaian tugas pengawasan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Pada penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner berjumlah 63 eksemplar. Kuesioner yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara membagikan kuesioner pada 23 instansi/dinas Kota Pariaman. Responden dari penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala sub-bagian Keuangan yang ada dilingkungan SKPD Kota Pariaman. Pembagian Kuesioner dilakukan tanggal 08 Juli 2019 dan selesai 20 Juli 2019. Jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 69 kuesioner (100%) dimana pada setiap instansi/dinas dibagikan sebanyak 3 kuesioner. Total kuesioner yang kembali sebanyak 63 kuesioner. Total kuesioner yang dapat dianalisis 63 kuesioner, sebanyak 6 kuesioner tidak kembali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel V.1

Tabel V.1
Jumlah responden dan tingkat pengembalian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang dikirim	69	100%
Total kuesioner yang kembali	63	94%

Total kuesioner yang tidak kembali	6	6%
Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
Total kuesioner yang dapat dianalisis	63	94%

Sumber : Data Olahan 2019

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama bekerja. Adapun karakteristik responden pada instansi/dinas di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel V.2
Karakteristik Responden pada Instansi Pemerintah Kota Pariaman

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase (100%)
1	Jenis kelamin		
	1. laki-laki	38 orang	60,32%
	2. perempuan	25 orang	39,68%
	Total	63 orang	100%
2	Latar Belakang Pendidikan		
	1. ekonomi/akuntansi	40 orang	63,49 %
	2. lainnya	23 orang	36.51 %
	Total	63 orang	100%
3	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA	3 orang	4, 76%
	2. D3	7 orang	11,11%
	3. S1	40 orang	63,49%
	4. S1	13 orang	20,64%
	Total	63 orang	100%

4.	Jabatan		
	1. kepala dinas	20 orang	31,75 %
	2. kepala keuangan	21 orang	33,33%
	3. kepala sub-bagian keuangan	22 orang	34,92%
	Total	63 orang	100%
5	Lama Bekerja		
	1. 1-5 tahun	23 orang	36,50%
	2. 6-10 tahun	20 orang	31,75%
	3. > 10 tahun	20 orang	31,75%
	Total	63 orang	100%

B. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk menarik kesimpulan yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, yang mana dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi: pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Kesimpulan yang didapat tergantung kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

1. Uji Validitas

Validitas diketahui melalui proses pengukuran yang kuat. Dikatakan mempunyai validitas yang kuat jika suatu instrument tersebut mengukur apa yang harusnya diukur. Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan/pernyataan pada kuesioner yang telah diedarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel V.3

Tabel V.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	<i>Pearson correlation</i>	Kesimpulan
Penerapan Akuntabilitas Keuangan	0,488**,-0,787**	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,299**,-0,656**	Valid
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	0,295**,-0,779**	Valid
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0,263**,-0,794**	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,693**,-0,753**	Valid

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel V.3 dapat dilihat bahwa skor masing-masing butir dan skor total (pearson correlation) menunjukkan bahwa korelasi signifikan pada level 0,01 dan 0,05 sehingga seluruh kuesioner dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah terdapat kesamaan data pada waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan standar 0,6. Dikatakan reliable apabila nilai koefisien *Cronbach's Alpha* >0,6 atau >60%. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel V.4

Tabel V.4
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Penerapan Akuntabilitas Keuangan	6	0,761	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	14	0,748	Reliabel
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	8	0,798	Reliabel
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	8	0,807	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7	0,863	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel V.4 Menunjukkan tidak ada koefisien *cronbach's alpha* yang kurang dari 0,60 sehingga instrumen tersebut reliabel untuk digunakan.

C. Uji Asumsi Klasik

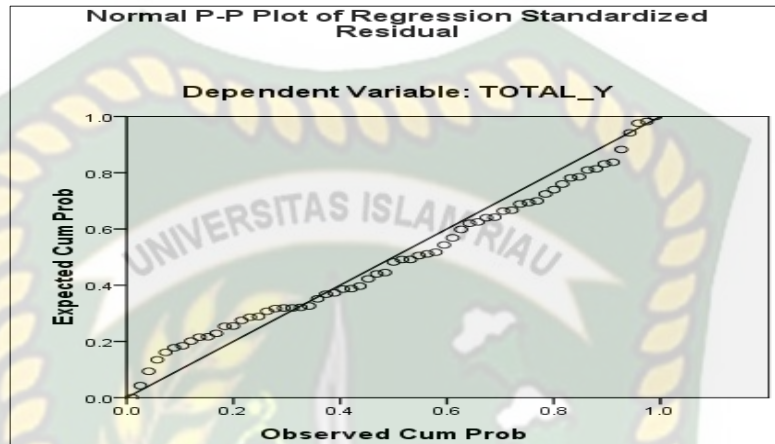
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Nur Savitri Mardalena : 2017) :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik)

tidak membentuk suatu pola dan mengikuti garis diagonal (Imam Ghozali 2011:161). Dapat dilihat pada gambar V.1:

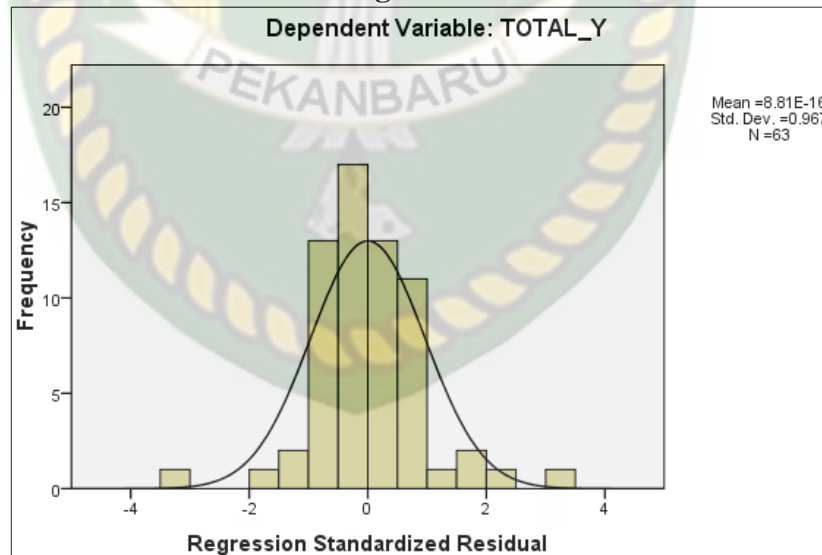
Gambar V.1



Sumber: Data Output SPSS, 2019

Gambar V.2

Histogram



Sumber: Data Output SPSS, 2019

Pada gambar V.2 bisa dilihat bahwa plotting data mengikuti garis diagonal berate dapat diartikan bahwa data berkontribusi normal, dan gambar histogram nya

juga menunjukkan data tersebut normal, maka dengan demikian pengujian dapat dilanjutkan pengujianya.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011 : 107-108) terjadinya gejala multikolinieritas jika nilai *Tolerance* > 0,100 dan nilai VIF < 10.00 untuk uji multikolinieritas menggunakan SPSS. Dapat dilihat pada tabel V.5:

Tabel V.5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5.629	1.017		-5.533	.000		
KPPP	.272	.057	.270	4.754	.000	.241	4.149
PAK	.289	.067	.221	4.302	.000	.296	3.380
PTI	.066	.033	.081	1.994	.051	.469	2.132
KAPD	.469	.055	.483	8.458	.000	.239	4.188

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data Output SPSS, 2019

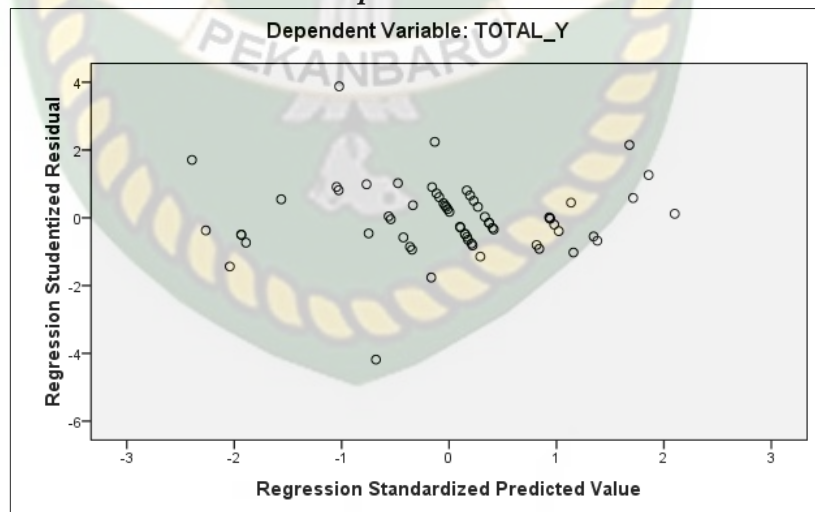
Dari hasil pengolahan data uji multikolinieritas menggunakan *SPSS for windows* dapat kita lihat nilai *Tolerance* untuk X1 = 0,296 > 0,100 dengan nilai

VIF 3,380 untuk $X_2 = 0,469 > 0,100$ dengan nilai VIF 2,132 untuk $X_3 = 0,239 > 0,100$ dengan nilai VIF 4,188 untuk $X_4 = 0,241 > 0,100$ dengan nilai VIF 4,149. Jadi variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikoleniritas. Sehingga pengujian data dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Imam Ghozali (2011:139) menyebutkan tidak terjadi heterokedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplots* serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan SPSS sebagai berikut :

Gambar V.3
Scatterplot Data



Sumber: Data Output SPSS, 2019

Dari gambar V.3 *Scatterplot* data hasil pengolahan menggunakan versi 22 bahwa uji heteroskedastisitas titik-titik tidak bertumpuk dan tidak membentuk suatu pola seperti berbentuk gelombang atau menyempit pada titik-titik yang

lainnya yang mana tidak berada dibawah atau diatas angka nol, ini menandakan tidak ada gejala heteroskedastisitas, maka peneliti dapat melanjutkan penelitian berikutnya.

D. Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil analisis regresi berganda menggunakan SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.629	1.017		-5.533	.000
PAK	.289	.067	.221	4.302	.000
PTI	.066	.033	.081	1.994	.051
KAPD	.469	.055	.483	8.458	.000
KPPP	.272	.057	.270	4.754	.000

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = -5,629 + 0,289 + 0,066 + 0,469 + 0,272$$

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah :

- a. Nilai konstanta(α) sebesar -5,629 artinya jika variabel-variabel independen yaitu penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi,

kompetensi aparatur pemerintah daerah, ketaatan pada peraturan perundangan bernilai 0 (nol) maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah -5,629.

- b. Nilai koefisien regresi variabel penerapan akuntabilitas keuangan (X_1) bernilai 0,289 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penerapan akuntabilitas keuangan sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 0,289 dengan asumsi variabel lainnya.
- c. Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi (X_2) bernilai 0,066 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.066 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- d. Nilai koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah daerah (X_3) bernilai 0,469 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,469 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- e. Nilai koefisien regresi ketaatan pada peraturan (X_4) bernilai 0,272 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,272 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

E. Koefisien Determinasi (R^2) / *Goodness Test*

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel Y mempengaruhi variabel X_1, X_2, X_3 . Nilai koefisien determinasi atau R^2 dapat dilihat dari tabel *Model Summary* Kolom *R Square* berikut :

Tabel V.7

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.955	.952	.756

a. Predictors: (Constant), KPPP, PTI, PAK, KAPD

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,955 artinya bahwa penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 95,5%. Sedangkan sisanya sebesar 4,5 % dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi ini. *Standar Error of the Estimate (SEE)* adalah ukuran kesalahan yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,756.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap nilai informasi laporan keuangan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikan dari masing-masing variabel. Apabila signifikan $<0,05$ maka hipotesis diterima dan apabila signifikan $>0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji t terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel V.6.

a. Uji Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X_1)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.6 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X_1) nilai signifikansinya adalah

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X_1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sehingga Hipotesis 1 (H1) dari penelitian ini diterima.

b. Uji Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.6 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) nilai signifikansinya adalah 0,051 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sehingga Hipotesis 2 (H2) dari penelitian ini ditolak.

c. Uji Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_3)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.6 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_3) nilai signifikansinya adalah 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_3) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sehingga Hipotesis 3 (H3) dari penelitian ini diterima.

d. Uji Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_4)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.6 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_4) nilai signifikansinya adalah 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_4)

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sehingga Hipotesis 4 (H4) dari penelitian ini diterima.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan menguji apa ada pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y, guna membuktikan hipotesis awal tentang pengaruh variabel berupa variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X_1) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_3) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X_4) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y). Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel V.9

Tabel V.9

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	700.569	4	175.142	306.472	.000 ^b
	Residual	33.146	58	.571		
	Total	733.714	62			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), KPPP, PTI, PAK, KAPD

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat probilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, artinya penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan ketaatan pada peraturan perundangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil uji pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Ardianto (2010) yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Riantirno & Nur Azlina (2011) tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Kabupaten Rokan Hulu, hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dalam Ardianto (2014) Hal ini sesuai dengan prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus lah jujur, objektif, transparan terhadap keuangan dan akurat.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil uji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tidak ada pengaruh dari variabel ini disebabkan sistem komputer cenderung kurang

fleksibel dan tidak dapat dengan cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem. Perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Ardianto :2014).

Sering kali pemerintah melakukan kesalahan dalam melakukan pengalihan dan suatu sistem lama ke sistem baru (konversi sistem) hal ini tentunya dapat berakibat fatal bagi pemerintah. Pengalihan Sistem Informasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru dapat berakibat fatal, terjadi karena Afani (2014).

Hasil penelitian ini mendukung hasil Penelitian terdahulu Ardianto (2014), Egrinaen Muliziska Nugraheni Putri (2015) dan Liliana (2011) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhanita (2013) dan Afani (2014) yang menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azwir Nasir dan Rianti Oktari (2012) menunjukkan terdapat adanya hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil uji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah yang dimiliki pemerintah mempunyai peran untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Ini juga disertai dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh responden dalam membuat laporan keuangan. Selain itu pengalaman kerja, kemampuan kerja dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang pegawai pada SKPD Kota Pariaman bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub-bagian akuntansi tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu telah mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu, Hutari (2011) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbeda dengan hal nya penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Ardianto

(2014) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil uji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berpengaruhnya ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disebabkan ketaatan pada peraturan perundangan pada suatu instansi ternyata memiliki peranan dalam keberhasilan penerapan AKIP. Hal ini sesuai dengan teori penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara, dimana poin kedua diungkapkan jika pelaksanaan AKIP didasari suatu sistem yang bisa menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Ardianto (2014) yang menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sejauh ini penulis belum menemukan hasil penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa ketaatan peraturan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena akuntabilitas membutuhkan aturan hukum yang jelas dan terbuka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data analisis yang diperoleh dan dijelaskan pada bab diatas dapat diperoleh kesimpulan :

1. Secara simultan, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pariaman.
2. Secara parsial, variabel penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Kota Pariaman. Sedangkan, variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Kota Pariaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah, dapat membuat perencanaan anggaran pemerintah lebih baik lagi agar bisa meningkatkan sistem pelaporan di akuntabilitas kinerja instansi Kota Pariaman.
2. Bagi peneliti sendiri pastinya menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang variabel-variabel yang berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh, dan bisa melanjutkan dengan mengambil sampel lebih luas lagi.

Dengan demikian, diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.

- BPK, Provinsi Sumatera Barat. Pariaman.go.id. Siaran Pers. 2018. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun 2018 Pemerintah Kota Pariaman. BPKP Sumatera Barat.
- BPKP, 2001. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- LAN RI, 2001. Lembaga Administrasi Negara.
- LAN RI, 2003. Lembaga Administrasi Negara.
- Liliana, 2011. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (Studi pada SKPD Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Moehariono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta; Raja. Grafindo Persada.
- Novita, Vina. 2008. Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Sistem Informasi yang Baru Terhadap Akuntan. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Riau.
- Nasir, Azwir dan Ranti. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerinta (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar. Pekanbaru.
- Putri, Egrinaen Mauliziska Nugraheni. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). JOM Fekon Vo.2 No.2 Oktober 2015. Pekanbaru.
- Reynaldi Rianto dan Nur Azlina. 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Evaluasi Anggaran, dan Umpan Balik Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Rofika, dkk, 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Ketaat

pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi Akuntansi. Universitas Riau

Rusman,dkk. 2011. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers

Santri, Tati. 2016. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Islam Riau.

Sudarmanto, 2009. Kinerja dan pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disertasi. Universitas Padjajaran.

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “ Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011, ” Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia”.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, ”Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Sutarman. 2009. Pengantar Teknologi Informasi. Penerbit Bumi Aksara : Jakarta

Tap.MPRS.Nomor.XX/MPRS1996 “tentang Implementasi dari Stufen Theori dalam sistem hukum Indonesia”.

Undang-undang RI Nomor: 22 Republik Indonesia Tahun 1999, “Tentang Pemerintah Daerah yang Direvisi Menjadi Undang-Undang Pemda 2014”.

Undang-Undang RI Nommor: 17 Republik Indonesia Tahun 2003, “Tentang Keuangan Negara”.

Undang-Undang RI Nomor : 1 Republik Indonesia Tahun 2004, “Tentang Perbendaharaan Negara”.

Undang-Undang RI Nomor : 13 Republik Indonesia Tahun 2003, “Tentang Ketenagakerjaan”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau